

Arum Nur Aulia

Universitas Tidar, **ANALISIS LAPORAN KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2019-2021**

Magelang

Email : arumaulia45@gmail.com

Zarah Eka Nur Saputri

Universitas Tidar, Magelang

Email : zarah.zensyxx@gmail.com

Risma Wira Bharata

Universitas Tidar, Magelang

Email : rismawirab@untidar.ac.id

***Abstract.** This study aims to analyze the financial performance of the Regional Government of Magelang Regency seen based on the Analysis of Budget Realization Reports. The Budget Realization Report is a financial report that presents an overview of the sources, allocation and use of economic resources managed by the local government. The realization report describes the comparison between the budget and its realization in one reporting period. The Budget Realization Report provides information regarding financial position that is useful for most users of the report in order to make decisions and demonstrate accountability for the use of resources entrusted to users. The method used is descriptive quantitative using the ratio of effectiveness and efficiency. Data obtained through field studies.*

***Keywords:** Revenue and Expenditure Budget Realization, Financial Performance*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang dilihat berdasarkan Analisis Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan keuangan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah. Laporan realisasi menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi mengenai posisi keuangan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan serta menunjukkan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada pengguna. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kuantitatif dengan menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi. Data diperoleh melalui studi lapangan.

Kata kunci: Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Kinerja Keuangan

LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan otonomi daerah serta meningkatkan pemerataan dan keadilan untuk stabilisasi setiap daerah dalam pembangunan daerah. Tuntutan tersebut dapat meningkatkan kinerja serta akuntabilitas kinerja pada pengukuran kinerja Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah dituntut untuk sanggup dalam membangun kinerja secara efektif untuk membangun daerahnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dikenal dengan otonomi daerah yang mengatur keseimbangan ekonomi antara pusat dan daerah, Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, kedua undang-undang tersebut tentu saja sangat erat kaitannya, karena ketika kekuasaan suatu negara berpindah dari pusat, transfer ke Daerah secara otomatis harus diikuti dengan transfer dana negara yang ditransfer pemerintah pusat untuk dapat menangani perekonomian masing-masing negara di dalam distrik-distrik. Padahal, UU No. 33 Tahun 2004 memiliki implikasi penting dan mendasar bagi hubungan ekonomi pusat dan daerah. Dalam penjelasannya, undang-undang ini antara lain menyebutkan bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang menggunakan sumber keuangan berdasarkan desentralisasi, desentralisasi, dan pengelolaan bersama, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah berbentuk sistem keuangan, diatur dengan pemisahan kekuasaan, tugas dan tanggung jawab yang jelas antar tingkatan pemerintahan.

Permendagri No. 56 Tahun 2007 mendefinisikan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban wilayah yang dapat dinilai secara moneter sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pendapatan dan kewajiban daerah saling terkait dengan anggaran belanja.

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan bagian yang sangat penting dari suatu perusahaan/lembaga yang bertugas untuk mengetahui keadaan keuangan perusahaan/lembaga tersebut. Laporan Pelaksanaan Anggaran adalah hasil akhir dari proses akuntansi, yaitu kumpulan dan pengelolaan data keuangan yang disajikan dalam

laporan atau ringkasan lainnya yang dapat digunakan untuk membantu pengguna dalam mengambil keputusan atau mengambil keputusan.

Tujuan pelaporan keuangan sektor publik adalah untuk memberikan informasi tentang sumber daya, alokasi, dan penggunaan dana untuk memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan membiayai operasinya dan memenuhi kebutuhan likuiditasnya, untuk memberikan informasi yang berguna untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh dana dari aktivitasnya, dan kinerja. Dalam tugas dan kewajibannya memberikan informasi tentang kondisi keuangan perusahaan dan tentang perubahan yang terjadi, serta informasi umum yang berguna untuk mengevaluasi kinerja masyarakat dalam hal biaya pelayanan, efisiensi dan pencapaian tujuan (Bastian, 2010:297).

KAJIAN TEORITIS

1. Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan merupakan sumber informasi penting bagi pengguna laporan keuangan saat membuat keputusan keuangan. Laporan keuangan memberikan banyak informasi tentang kinerja manajemen dan kesehatan industri. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa laporan keuangan masih memiliki banyak celah dalam menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh beberapa pihak, sehingga diperlukan analisis laporan keuangan untuk menganalisis dan menginterpretasikan laporan tersebut sehingga dapat memberikan data yang valid bagi pihak yang berkepentingan.

Analisis laporan keuangan melibatkan pemeriksaan hubungan dan tren atau kecenderungan untuk menentukan apakah kondisi keuangan industri, hasil operasi dan kinerja keuangan memuaskan atau tidak memuaskan, Jumingan (2011,p.42). Analisis bertujuan untuk mengukur keterkaitan antara pos-pos laporan keuangan dan variasinya dari tahun ke tahun untuk mengetahui perkembangannya.

2. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Undang-Undang Akuntansi, laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Pelaksanaan Anggaran, Laporan Finansial dan Catatan Penjelasan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Laba Rugi

(LRA) dan Laporan Saldo Anggaran Lebih (SAL). Laporan keuangan terdiri dari neraca, laporan operasi (LO), laporan perubahan ekuitas (LPE) dan laporan arus kas. CaLK adalah laporan yang menetapkan atau menjelaskan lebih lanjut pokok-pokok laporan pelaksanaan anggaran atau laporan keuangan dan laporan yang merupakan satu kesatuan dengan laporan pelaksanaan anggaran atau laporan keuangan.

3. Ukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengukuran Kinerja Keuangan Sektor Publik merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik mengevaluasi penerapan strategi melalui alat ukur keuangan dan non keuangan. Pengukuran kinerja keuangan sektor publik dilakukan untuk mencapai tiga tujuan, yang pertama pengukuran kinerja sektor publik bertujuan untuk meningkatkan kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja yang membantu dewan fokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Singkatnya, masalah ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi sektor publik dalam memberikan layanan sektor publik. Kedua, pengukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan membuat keputusan. Ketiga, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk melaksanakan akuntabilitas publik dan meningkatkan komunikasi kelembagaan (Ulum, 2009:19-21).

4. Komponen Laporan Keuangan

Entitas pelaporan sesuai peraturan perundang-undangan wajib untuk menyampaikan pertanggungjawaban yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran merupakan laporan keuangan yang memberikan gambaran tentang asal usul, alokasi, dan penggunaan dana yang dikelola oleh pemerintah kota. Laporan pelaksanaan menggambarkan perbandingan anggaran dan pelaksanaannya dalam satu periode pelaporan. Komponen laporan kinerja anggaran adalah pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan.

2. Neraca

Menurut Soemarso (2004:P. 34), neraca adalah laporan keuangan yang memuat jumlah aktiva (assets), kewajiban (liability) dan modal (equity) pada akhir periode akuntansi. Neraca memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan sumber biaya yang digunakan untuk memperolehnya.

3. Laporan Arus Kas

Menurut Baridwani (2004,p.40), laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi penting tentang penerimaan dan pengeluaran dana dari investasi, konsumsi, dan aktivitas bisnis selama periode tertentu. Arus kas bisnis merupakan arus kas yang berhubungan langsung dengan laba, seperti arus kas yang diterima dari pelanggan dan pembayaran gaji karyawan perusahaan. Arus kas dari investasi meliputi arus kas yang berkaitan dengan pembelian atau penjualan aset produksi perusahaan, seperti pembelian dan penjualan aset tetap perusahaan. Arus kas keuangan merupakan arus kas yang berhubungan langsung dengan pembiayaan perusahaan, seperti mengambil dan membayar utang kepada investor dan kreditur.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan adalah daftar rinci atau analisis nilai (jumlah) pos-pos yang disajikan dalam laporan kinerja anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Catatan tersebut juga memuat pengungkapan tentang kebijakan akuntansi dan pengungkapan lain yang diwajibkan.

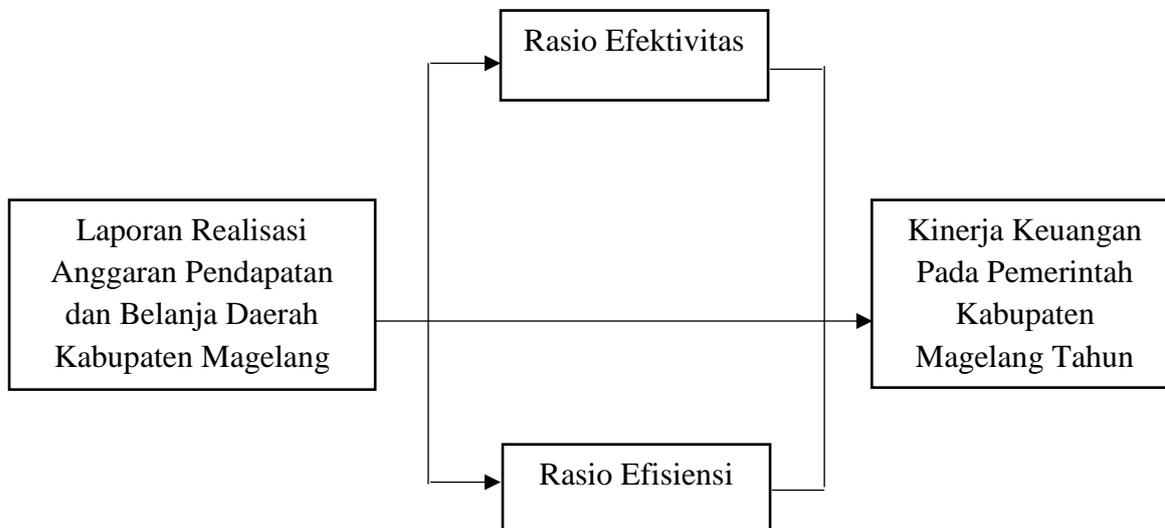
METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang digunakan untuk menguji atau mengukur data yang sudah terkumpul agar memperoleh hasil yang sebenarnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa Laporan Keuangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang tahun 2019-2021 yang didapat melalui website <https://sibata.magelangkab.go.id/publik?m1=1>.

Dalam menganalisis data penelitian menggunakan dua jenis rasio, yaitu rasio efektivitas dan rasio efisiensi.

Kerangka Penelitian



Metode Analisis Data

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan anggaran penerimaan PAD kemudian dikali 100%.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Anggaran Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Adapun kriteri pengukuran rasio efektivitas penerimaan PAD menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 sebagai berikut :

Hasil Perbandingan (%)	Kriteria
Lebih dari 100	Sangat Efektif
Antara 90-100	Efektif
Antara 80-90	Cukup Efektif
Antara 60-80	Kurang Efektif
Kurang dari 60	Tidak Efektif

Tingkat Efisiensi dapat diukur dengan cara membandingkan realisasi belanja daerah dengan anggaran belanja daerah kemudian dikali 100%.

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Adapun kriteria pengukuran rasio efisiensi menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996 sebagai berikut :

Hasil Perbandingan (%)	Kriteria
Lebih dari 100	Tidak Efisien
Antara 90-100	Kurang Efisien
Antara 80-90	Cukup Efisien
Antara 60-80	Efisien
Kurang dari 60	Sangat Efisien

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Efektivitas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021 diukur menggunakan rasio efektivitas berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis Rasio Efektivitas

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Tingkat Efektivitas	Keterangan
2019	Rp 417.178.099.961	Rp 441.347.020.000	94,52%	Efektif
2020	Rp 329.769.193.224	Rp 265.502.524.500	124,20%	Sangat Efektif
2021	Rp 375.378.465.373	Rp 361.937.105.587	103,71%	Sangat Efektif
Rata-Rata			107,47%	Sangat Efektif

Tabel 1 menunjukkan bahwa selama periode tahun anggaran 2019-2021, tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang mengalami kenaikan dan sedikit mengalami penurunan. Tingkat efektivitas pada tahun 2019 sebesar 94,52% dengan kriteria efektif, tahun 2020 tingkat efektivitas mengalami kenaikan menjadi 124,20% dengan kriteria sangat efektif, sedangkan tahun 2021 tingkat efektivitas mengalami sedikit penurunan menjadi 103,71% tetapi masih dengan kriteria sangat efektif. Dari data tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan PAD Kabupaten Magelang yang paling efektif yaitu tahun 2020 sebesar 124,20%. Jika dihitung rata-rata menghasilkan tingkat efektivitas sebesar 107,47% dengan kriteria sangat efektif.

Tingkat Efisiensi Anggaran Belanja Kabupaten Magelang Tahun 2019-2021 diukur menggunakan rasio efisiensi berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2. Analisis Rasio Efisiensi

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Belanja	Tingkat Efisiensi	Keterangan
2019	Rp 1.884.681.713.041	Rp 2.166.566.147.754	86,98%	Cukup Efisien
2020	Rp 1.636.641.956.462	Rp 1.903.610.290.787	85,97%	Cukup Efisien
2021	Rp 1.771.575.214.425	Rp 2.103.718.131.726	84,21%	Cukup Efisien
Rata-Rata			85,72%	Cukup Efisien

Table 2 menunjukkan bahwa selama periode tahun anggaran 2019-2021, Anggaran Belanja Kabupaten Magelang menghasilkan tingkat efisiensi dengan kriteria cukup efisien karena setiap tahun memiliki tingkat efisiensi antara 80%-90%. Pada tahun 2019 tingkat efisien sebesar 86,98%, tahun 2020 sebesar 85,97%, dan tahun 2021 sebesar 84,21%. Jika dihitung rata-rata menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 85,72% dengan kriteria cukup efisien.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan:

1. Tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang tahun 2019-2021 mengalami kenaikan yang signifikan.
2. Tingkat efektivitas penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Magelang tahun 2019-2021 rata-rata menghasilkan tingkat efektivitas sebesar 107,47%.
3. Tingkat efisiensi Anggaran Belanja Kabupaten Magelang tahun 2019-2021 yang diukur menggunakan rasio efisiensi berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menghasilkan tingkat efisiensi dengan kriteria cukup efisien.
4. Tingkat efisiensi Anggaran Belanja Kabupaten Magelang tahun 2019-2021 rata-rata menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 85,72%.

Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, peneliti memberikan saran kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan serta mempertahankan tingkat efektivitas dan efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga dapat meningkatkan kemandirian daerah tersebut.

DAFTAR REFERENSI

- Dien, A. N., Tinangon, J., & Walandouw, S. (2015). ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PADA KANTOR DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG. *Jurnal EMBA*, 532-541.
- Hapsari, M., Winarsih, E., & Prabawa, S. T. (2022). ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA PEMDA KOTA SURAKARTA DI ERA PANDEMI COVID-19. *Edunomika-Vol. 06*, 1-11.
- Magelang, P. K. (2020). *LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH*.
- Marlena, Murnisari, R., & Purbaningrum, N. L. (2022). ANALISIS REALISASI ANGGARAN UNTUK MENILAI EFEKTIVITAS KINERJA ANGGARAN PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN TULUNGAGUNG. *Journal of Accounting and Tax*, 45-55.
- Ruliaty, Badollahi, I., & Nurfadillah, A. I. (2019). ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE. *Jurnal Ekonomi Invoice*, 40-66.
- Sriwati, N. K. (2016). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI SALAH SATU ALAT UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PUSKESMAS MEKO KECAMATAN PAMONA BARAT KABUPATEN POSO. *Jurnal EKOMEN Vol. 16 No. 2*, 19-25.